

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, A.A. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Skripsi
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* Vol 1 No.2
- Anthony, R.N dan Govindarajan, V. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen* Buku 2. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bahri, S.P. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), Universitas Pasundan, Bandung.
- Deddi, N. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Endrayani, K.S, Adiputra, I.M.P dan Darmawan, N.A.S. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 2 No. 1*
- Gede, H.M. 2014. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawan Internal Sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No.1 tahun 2014*
- Ghozali, I, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN
- Laksana, A.P dan Handayani, B.D. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal* Vol 3 No.2

- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA
- Mardiasmo. 2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Noordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, P.A. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). Skripsi
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). E journal akuntansi unp Vol 1, No 1
- Riswanto, N. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016
- Rohmawati, I. 2015. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sragen)
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business* Buku2. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Solikin, A. 2006. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. No 2. November.

Susilowati, H. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)

Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Verasvera, F.A. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Wertianti, I G A Gede., dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. Ejournal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.